

## Penyetaraan Gender di Sri Lanka: Konflik Macam Tamil sebagai Tantangan Program UNDP

*Bayu Setyawan*

Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya

[bayu.dagut@gmail.com](mailto:bayu.dagut@gmail.com)

### **Abstract**

*The issue of gender inequality in Sri Lanka has made women get discriminatory treatment in various ways, both in the social and political manner, as well as in education and employment. UNDP has made efforts to fight for the rights of Sri Lankan women. However, these efforts impressed without significant development. This study tries to explain the various obstacles faced by UNDP. The study uses the concept of an international regime with qualitative analysis methods. The results of the study indicate that UNDP has not succeeded in equalizing gender in Sri Lanka because the separatist Tigers conflict has hampered international assistance.*

**Keywords:** Sri Lanka, UNDP, gender, tamil tiger

### **Abstrak**

Masalah ketimpangan gender di Sri Lanka telah membuat perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari berbagai cara, baik secara sosial-politik, pendidikan, dan pekerjaan. UNDP telah melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Sri Lanka. Namun, upaya ini terkesan tanpa perkembangan signifikan. Studi ini mencoba menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh UNDP. Penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDP belum berhasil menyetarakan gender di Sri Lanka karena konflik separatis Macan telah menghambat bantuan internasional tersebut.

**Kata Kunci:** Sri Lanka, UNDP, gender, macan tamil

### **Latar Belakang**

Meski fenomena diskriminasi gender di Sri Lanka bukan hal baru, tapi sampai sekarang masih belum ada jalan keluar untuk masalah diskriminasi yang telah dialami oleh perempuan di negara ini. Wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki di mata hukum. Tetapi dalam aturan keluarga dan setiap komunitas, kenyataannya cenderung bersifat diskriminatif. Juga mengenai aturan pernikahan, perceraian, properti, transaksi keuangan. Dalam beberapa kelompok masyarakat, hak yang sama wanita dengan laki-laki tidak diakui, terutama kepemilikan ke tanah perumahan yang berasal dari bantuan negara. Hukum pekerja sesuai dengan standar internasional, tapi implementasi nya masih relatif lemah, hukum pekerja tidak menguntungkan bagi perempuan. Mereka ditempatkan pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada laki-laki di piramida kerja.<sup>20</sup>

Mayoritas wanita mendapat akses 13 tahun pendidikan gratis di sebagian besar daerah di Sri Lanka. Namun, banyak wanita Sri Lanka tidak memiliki akses yang sama kepada laki-laki untuk mencari pekerjaan. Meskipun Sri Lanka adalah salah satu negara pertama di dunia di era pemerintahan modern yang memungkinkan perempuan untuk memilih, dan bahkan pernah satu kali memiliki seorang perdana menteri perempuan, hanya sebagian kecil perempuan yang berpartisipasi dalam tingkat politik. Berbeda dengan negara-negara tetangganya di wilayah Asia Selatan, Sri Lanka tidak memiliki kuota yang membutuhkan persentase khusus perempuan untuk menjalankan posisi dalam sistem pemerintah (Green, n.d.).

Pada kebanyakan distrik, persentase dari anak-anak yang putus sekolah, tidak bersekolah atau baru mulai bersekolah tidaklah terlalu signifikan. Namun pada salah satu distrik yang rawan konflik, terdapat 17% anak putus sekolah, tidak bersekolah atau tidak pernah mendaftar untuk bersekolah.

Di sebagian besar distrik, persentase anak yang putus sekolah, tidak bersekolah atau baru bersekolah tidak terlalu signifikan. Namun di distrik yang rawan konflik, ada 17% anak putus sekolah, tidak bersekolah atau tidak pernah mendaftar sekolah (Senarath, n.d.).

Dalam perkembangan Sri Lanka, United Nations Development Programme (UNDP) sebagai badan PBB yang berfokus pada pengembangan program di suatu negara telah membantu Sri Lanka dalam program kesetaraan gender. Setelah memulai operasinya di Sri Lanka pada tahun 1967, UNDP didedikasikan untuk mendukung Sri Lanka dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) dan pengurangan

---

<sup>20</sup> Fokus penelitian ini adalah permasalahan gender dan upaya UNDP sejak awal tahun 2000 sampai tahun 2014.

kemiskinan. Program ini ditunjukkan oleh kegiatan para aktivis UNDP, yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pelatihan bagi warga masyarakat di Sri Lanka, terutama perempuan dalam upaya untuk mengarusutamakan gender dan untuk memperjuangkan hak-hak politik di Sri Lanka. Dengan berakhirnya konflik 30 tahun di Sri Lanka, negara ini sekarang berada dalam posisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan manusia yang adil dan berkelanjutan.

Namun, tujuan UNDP di Sri Lanka yang seharusnya berjalan dengan positif seperti jalan di tempat di tengah konflik berdarah antara pemerintah Sri Lanka dengan separatis Macan Tamil atau (LTTE)<sup>21</sup>. Bahkan setelah berakhirnya konflik, tidak ada kemajuan yang signifikan dari program MDGs. Dengan berfokus pada tantangan program UNDP di Sri Lanka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa konflik separatis Macan Tamil telah menghambat bantuan internasional, termasuk UNDP, di negara tersebut.

### **Kerangka Konsep dan Metode**

Dalam upaya menjelaskan permasalahan di Sri Lanka tersebut, penulis menggunakan konsep Efektivitas Rezim Internasional, terkait dengan peran UNDP di Sri Lanka. Dalam memahami Efektivitas rezim internasional, ada beberapa pemahaman tentang efektivitas rezim internasional. Para ekonom mendefinisikan efektivitas rezim sebagai rasio keuntungan yang diperoleh dari hasil yang diberikan dan biaya yang terkait dengan pencapaian tersebut. Pemahaman ini menyebar ke banyak penelitian awal tentang evaluasi kebijakan publik. Sementara hukum internasional berkaitan dengan efektivitas rezim internasional. Hukum internasional untuk memahami keefektifannya sebagai status hukum tertentu dari suatu norma, yaitu terikat pada tujuan atau terikat dengan implementasi aturan, seperti dampak pada situasi faktual yang relevan. Definisi keefektifan memiliki keterkaitan dengan pengertian keefektifan yang diterapkan oleh para ilmuwan politik yang biasanya lebih fokus pada pencapaian tujuan daripada penggunaan sumber daya. Misalnya saja pembahasan institusi domestik. Dengan menerapkan efektivitas rezim semacam itu, maka kita dapat menentukan sejauh mana efektivitas rezim internasional untuk mempertahankan legitimasinya dalam suatu fenomena (Stokke, 2007).

Studi ini berfokus pada rentan waktu sejak 1967, di mana UNDP mulai beroperasi di Sri Lanka dan kemudian menjalankan program MDGs. UNDP bertujuan mengarahkan Sri Lanka dalam kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi aktif

---

<sup>21</sup> Liberation Tigers of Tamil Eelam

perempuan dalam struktur kekuasaan, dan juga pengambilan keputusan politik. Rentang waktu dibatasi hingga tahun 2012, dengan melihat situasi gender di berbagai bidang di Sri Lanka beberapa tahun setelah berakhirnya konflik yang banyak memakan korban antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis Macan Tamil.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, karena data yang diperoleh adalah sekunder sehingga harus dipahami kualitasnya. Kemudian didukung oleh fakta yang didasarkan pada kerangka teori yang diterapkan sehingga dapat ditemukan hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung metode tersebut adalah melalui studi literatur yang diambil dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan media internet yang relevan.

### **Program UNDP di Sri Lanka**

Program UNDP bertujuan untuk menyediakan bantuan teknis dan pengembangan di dunia. Berbasis di New York City dan juga organisasi terbesar di PBB, Organisasi ini didanai oleh donor. Pedonor biasanya membantu memberikan para ahli dan penasihat, pelatihan, dan pengembangan peralatan untuk negara-negara berkembang dengan meningkatkan penyediaan bantuan.

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia.

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis Program PBB dan Dana Khusus PBB). Organisasi ini dipandang sebagai organisasi yang melakukan tugas utama PBB di samping perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia.

Pedonor UNDP terbesar adalah Amerika Serikat (AS) yang berkontribusi sebesar \$ 243 juta, diikuti oleh Inggris yang memberikan kontribusi \$ 233 juta pada UNDP. Norwegia, Jepang, Swedia, dan Belanda memberikan kontribusi lebih dari \$ 100 juta. Sementara Uni Eropa berkontribusi lebih dari \$ 921. UNDP memiliki keanggotaan sekitar 166 negara dari seluruh dunia dan bekerja dengan bantuan pemerintah dan LSM lokal. Fungsi umum UNDP adalah untuk mewujudkan demokrasi di negara,

mengurangi kemiskinan, membantu negara berkembang dari kesulitan, membantu mengembangkan energi dan keseimbangan lingkungan, dan mencegah HIV / AIDS.

Pasca berakhirnya konflik selama tiga dekade di Sri Lanka, UNDP membantu negara ini dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan manusia yang adil dan berkelanjutan. Namun, ada beberapa tantangan yang masih harus ditangani. UNDP sendiri mulai beroperasi di Sri Lanka pada tahun 1967, tujuan menyeluruh UNDP adalah untuk mendukung negara tersebut dalam mencapai MDGs dan pengurangan angka kemiskinan. UNDP mengejar tujuan ini dengan bekerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka sejalan dengan tujuan dari "Government of Sri Lanka in line with the National Development Policy Framework Vision", Mahinda Chintana 2011-2016 dan dalam United Nations Development Assistance Framework (UNDAF).

Dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat pusat dan daerah di Sri Lanka, UNDP menekankan peningkatan kelembagaan yang baik, mempromosikan multi-stakeholder, pendekatan advokasi kebijakan dan reformasi, dan memanfaatkan pengetahuan di Sri Lanka sebagai pembelajaran global. UNDP juga bekerja sama dengan sektor swasta serta bertujuan meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dan para pemuda, mempromosikannya sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dan memberdayakan mereka untuk mengakses peluang baru.

UNDP telah terlibat serta beroperasi di Sri Lanka selama lebih dari enam dekade dan memberikan program-program baru. Pasca konflik, UNDP membantu masyarakat membangun kehidupan yang produktif dan membangun kembali infrastruktur skala kecil. Ini juga memungkinkan mereka untuk menjadi lebih tangguh dengan terlibat dalam perencanaan di tingkat desa. Selain itu kapasitasnya dalam tanggap bencana telah meningkat seperti misalnya kemampuan membangun rumah yang tahan terhadap badai dan banjir.

UNDP telah memainkan peran dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Sri Lanka untuk meningkatkan pemantauan arus bantuan (sebagaimana tercantum dalam agenda Paris) melalui pembentukan Sistem Terpadu Informasi Data Nasional atau *Integrated National Data Information System* (Indis). Database ini memonitor berbagai indikator kinerja utama, termasuk berbagai parameter berdasarkan Hasil berbasis Manajemen atau *Results-based Management* (RBM). Bertempat di Departemen Keuangan, database tersebut telah memperkuat akuntabilitas penggunaan dana maupun pengelolaan bantuan. Sistem Indis juga

memiliki kemampuan mengelola evaluasi proyek pembangunan di masa lalu yang meliputi pelajaran. Hal ini telah meningkatkan pengembangan proposal proyek. Pada tahun 2011, dengan dukungan teknis UNDP, Departemen Keuangan dan Perencanaan mewajibkan penggunaan teknik RBM untuk memantau kinerja dan penyusunan anggaran.

Untuk mendukung struktur pemerintahan, UNDP telah membangun kapasitas dan dekonsentrasi pemerintah, serta lembaga-lembaga yang dipilih secara lokal. Ini kemudian menjadi posisi yang kuat untuk merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengadopsi praktik terbaik untuk desain bangunan dan penggunaan lahan. UNDP juga telah membangun hubungan yang erat dengan lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam masalah lingkungan. Ini adalah posisi strategis dalam mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan respon terhadap bencana alam, organisasi UNDP telah memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat pusat penanggulangan bencana nasional di Sri Lanka. UNDP didukung lebih dari 30 instansi pemerintah yang terlibat dengan pengembangan, konservasi dan perencanaan untuk melakukan evaluasi strategis bagi lingkungan terpadu untuk provinsi utara Sri Lanka (Jafna) yang terkena dampak konflik. Hal ini diimplementasikan dengan didirikannya baseline lingkungan serta pemetaan sebagai daerah arkeologi penting dan juga sebagai koridor bagi satwa-satwa liar. UNDP melakukan banyak hal sebagai komitmen untuk memberikan bantuan teknis bagi pembangunan di negara-negara berkembang.

### **Program Kepemimpinan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi**

UNDP Sri Lanka dengan dukungan dari *Bureau for Crisis Prevention and Recovery* (Biro Pencegahan dan Pemulihan Krisis) telah mengupayakan program *Women's Leadership Development Project* (WLDP) sejak tahun 2009 di Ampara, sebuah distrik multi etnis di Pantai timur Sri Lanka. Ampara dipilih sebagai contoh pengembangan program untuk perempuan karena distrik ini merupakan wilayah terparah atas dampak bencana Tsunami serta konflik etnis di Sri Lanka. Selain itu distrik ini menunjukkan adanya tingkat partisipasi politik perempuan yang paling rendah di Sri Lanka. Hal ini diperparah dengan kurangnya eksistensi LSM perempuan dan bantuan advokasi gender. Dengan melibatkan sejumlah pemimpin perempuan potensial dari berbagai segmen masyarakat, proyek tersebut telah memberikan support kepada perempuan

untuk memperkuat keterampilan mereka dalam bidang hukum, terutama menyangkut hak mereka sebagai perempuan, manajemen proyek, mobilisasi sumber daya dan komunikasi selain sumber dana untuk memulai kegiatan di tingkat masyarakat.

WLDP lebih banyak dijalankan melalui beberapa kegiatan pelatihan, share pengetahuan, dan membentuk jaringan organisasi perempuan. Beberapa pemimpin perempuan membagikan pengalaman mereka, mulai dari pengalaman pemilu lokal, mengatasi hambatan budaya dan menjembatani perbedaan etnis. Program ini dilengkapi dengan diskusi tentang bagaimana PBB, pemerintah dan masyarakat sipil bisa lebih baik dalam membantu mempromosikan dan mendukung pemimpin perempuan untuk bergerak maju. Jaringan perempuan diupayakan dengan menghubungkan para pemimpin dan petugas Pengembangan Distrik bagi kaum Perempuan yang dapat berfungsi sebagai platform untuk mengatasi isu-isu perempuan dan mengangkat isu-isu yang lebih besar berdasarkan Komite Nasional Colombo.

Melalui WLDP, UNDP bersinergi dengan mitra pendonor untuk meningkatkan perhatian terhadap tantangan kepemimpinan perempuan secara hukum. Upaya ini menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemimpin perempuan. Selain itu, pengalaman yang dibagikan berguna untuk menunjukkan kemungkinan hasil positif. Upaya-upaya WLDP yang lebih banyak dijalankan di Ampara, tersebut dimaksudkan sebagai model bagi daerah lain di negara tersebut (n-peace.net, 2012).

WLDP digalakkan berkaitan dengan latar belakang buruknya kesetaraan gender di Sri Lanka. Rendahnya pendidikan dan upah kerja serta kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang berkepanjangan. Kurangnya akses terhadap sumber daya, keterampilan dan jaringan sering menghambat perempuan untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan dalam struktur masyarakat. Secara keseluruhan, representasi perempuan sangat rendah dalam bidang politik baik di tingkat nasional dan lokal. Meski telah ada berbagai organisasi perempuan yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, namun banyak dari upaya ini yang belum mencapai hasil signifikan. Partisipasi perempuan masih tergolong sangat terbatas.

Untuk itu program WLDP ditujukan untuk membangun kepercayaan diri, keberanian dan kemampuan perempuan dalam menangani dampak konflik. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi dan advokasi, hak dan kewajiban, serta kesetaraan gender dalam bisnis yang berorientasi pada strategi jaringan dan mobilisasi sumber daya. Program ini rutin dijalankan setidaknya setiap

bulan. Dengan latar belakang etnis, sosial dan ekonomi yang berbeda, mereka bertemu untuk membentuk ikatan yang kuat tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Untuk melangsungkan program ini, berbagai kalangan digandeng sebagai mitra kerja, mulai dari pemerintah/pejabat, media dan elemen masyarakat lain. Dengan adanya WLDP, partisipasi perempuan di Sri Lanka diharapkan dapat meningkat. Mulai dari sisi sosial, seperti peran mereka dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dalam ranah politik baik lokal maupun nasional (UNDP, 2012).

Lalu bagaimana pencapaian program terhadap perempuan yang telah dilaksanakan sejak 2009? Hal ini penting karena berkaitan dengan tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan pada bulan Desember 2015. Sejauh ini Sri Lanka mengklaim telah mengurangi kemiskinan, dari angka 26,1 persen pada 1990-1991 menjadi 6,7 persen pada 2012-2013. Namun demikian dalam kesetaraan gender, upaya yang telah dilakukan dinilai belum maksimal. 51,8 persen dari total penduduk negara itu adalah perempuan. Namun hanya 34 persen saja yang berada pada status tenaga kerja. Meski secara umum, Sri Lanka memang telah menikmati kemajuan yang signifikan dalam indikator sosial dan ekonomi.

Tetapi mengingat adanya perubahan demografi, kemajuan Sri Lanka akhirnya akan tergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan kesempatan keikutsertaan perempuan dan orang-orang muda untuk aktif dalam agenda pembangunan pasca-2015. Untuk itu melalui berbagai program khusus untuk memajukan perempuan, perempuan harus berada dalam kontrol penuh. Mereka harus ikut serta secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan politik. Hal ini juga diharapkan akan mampu menekan tingkat diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan (Perera, 2015).

Dengan melihat fakta tersebut, tingkat kesetaraan gender di Sri Lanka masih belum tercapai seperti yang diharapkan. Beberapa kemajuan mungkin telah dicapai, namun khusus pada aspek gender, negara ini masih berada di bawah standar. Meskipun program dari PBB terus digalakkan, pencapaian yang belum memuaskan tentu menuntut penjelasan lebih lanjut.

### **Ketidaksetaraan Gender Di Sri Lanka**

Berbagai hal serupa sebenarnya telah diupayakan oleh PBB dalam membangun kesetaraan gender di Sri Lanka. Namun demikian, upaya selama ini tidak begitu menunjukkan hasil yang cukup signifikan.



Sebuah panel PBB yang diselenggarakan pada tahun 2012 menemukan kegagalan peran PBB dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Sri Lanka. Beberapa fakta yang ditunjukkan dalam panel yang diselenggarakan untuk mengulas perkembangan aksi PBB di negara tersebut berkaitan dengan sistem dan mandat yang seharusnya dijalankan. Sebagai contoh, beberapa staf lapangan tidak dapat menjalankan tugas dalam melindungi masyarakat. Bahkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara petugas lapangan dengan kantor pusat. Adanya tekanan yang didapatkan menjadi alasan untuk menghindari konfrontasi dengan pemerintah. Secara keseluruhan, panel ini menyimpulkan bahwa upaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia belum cukup memberikan hasil (UN, 2012).

Kehadiran UNDP di Sri Lanka juga tidak begitu menunjukkan kemajuan. Kesetaraan gender yang menjadi salah satu tujuan MDGs belum bisa dicapai. Di Sri Lanka, mayoritas keluarga yang kurang mampu sangat memprioritaskan anak laki-lakinya untuk mendapatkan kesempatan dalam bidang pendidikan yang lebih besar jika dibandingkan dari anak perempuan. Hal ini dikarenakan tidak semua keluarga di seluruh bagian Sri Lanka mendapatkan akses pendidikan gratis. Kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu berasumsi bahwa nantinya laki-laki berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mampu mengangkat kondisi ekonomi keluarganya daripada perempuan. Sehingga kebanyakan kaum perempuan yang minim edukasi dan pengetahuan tentang politik terkadang mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan kaum perempuan sangat jarang mendapatkan jabatan atau posisi sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau dunia kerja seperti perkantoran, apalagi untuk berkarir dalam bidang politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.

Situasi ekonomi di Sri Lanka membuat kaum perempuan terpaksa harus bekerja di luar negeri. Data dari pemerintah Sri Lanka tahun 2009 menunjukkan sebanyak lebih dari 77.000 perempuan asal Sri Lanka bekerja di Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga. 42.000 di antaranya bekerja di Arab Saudi. Perempuan asal Sri Lanka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi juga berperan penting dalam mendatangkan devisa bagi Sri Lanka. Pada tahun 2009, senilai setengah dari 3,4 miliar dolar AS dari jumlah total pengiriman uang ke Sri Lanka berasal dari cek yang dikirim perempuan pekerja imigran (R.A Kawilarang, 2010).

Diskriminasi gender di Sri Lanka tidak hanya dalam bidang pekerjaan, kaum perempuan mengalami diskriminasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kemudian

juga berimbas terhadap bidang politik terkait peran politik mereka di Sri Lanka. Hal tersebut tidak lepas dari faktor kebudayaan di Sri Lanka yang memang sudah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Permasalahan yang sering kali menjadi hambatan bagi kaum perempuan dalam upaya melawan berbagai bentuk diskriminasi gender di Sri Lanka adalah tingkat partisipasi politik di Sri Lanka yang masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Diskriminasi yang terjadi terhadap kaum perempuan pada beberapa bidang dan aspek kehidupan dapat diminimalisir. Namun, pada tingkat politik masih belum mencapai hasil yang memuaskan.

Kaum perempuan terus mengalami dan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam memasuki lembaga pemerintahan. Partai-partai politik gagal untuk memilih mereka sebagai calon kandidat untuk masuk bidang politik dan pemilihan itu sendiri telah merefleksikan dominasi maskulin. Stereotip gender dalam masyarakat lebih cenderung pada memilih laki-laki. Jumlah dari representasi dari perempuan yang sangat minim di lembaga-lembaga pemerintahan menyebabkan kendala-kendala baru seperti pembatasan kapasitasnya untuk berperan.

Jika melihat sejarah, persentase perempuan di parlemen pertama pada tahun 1947 adalah 3%. Kemudian mengalami sedikit peningkatan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Setelah lebih dari 50 tahun, persentase perempuan di parlemen tahun 2012 hanya mampu mencapai angka maksimal 5,7% dan partisipasi kaum perempuan pada tingkat daerah hanya sebesar 1,8%. Persentase keterlibatan kaum perempuan di parlemen Sri Lanka memang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangganya yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah seperti Bangladesh yang mencapai angka 15% dari kursi di parlemen untuk perempuan, Pakistan pada angka 30%, dan Afghanistan yang mampu mencapai angka lebih dari 27% ([lankanewspapers.com](http://lankanewspapers.com), 2010). Rendahnya tingkat keterlibatan sebenarnya tidak hanya pada aspek politik. Dalam bidang sosial ekonomi, perempuan muda yang berpartisipasi jauh lebih sedikit sebagai tenaga kerja dibandingkan laki-laki muda. Bahkan mereka juga cenderung lebih banyak menganggur.

## **Konflik Macan Tamil Sebagai Penghambat UNDP**

Konflik disintegritas merupakan salah satu masalah besar yang pernah dihadapi Sri Lanka. Dalam catatan sejarah negara pulau di Asia Selatan ini, kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) telah berusaha melakukan gerakan separatis. Gerakan yang berbasis etnis ini bertujuan mendirikan Negara Tamil yang berdaulat di wilayah Tenggara Sri Lanka. Macan Tamil yang dibentuk pada 1976 oleh Velupillai Prabhakaran ini telah melakukan berbagai gerakan perlawanan secara gerilya terhadap pemerintah Sri Lanka (Robertson, 2010, p. 293).

Bagian ini menjelaskan beberapa poin tentang konflik sipil antara pemerintah dan etnis Tamil yang menyebabkan instabilitas nasional. Keamanan suatu negara tentu berpengaruh terhadap berbagai upaya pembangunan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah nasional, maupun pihak luar. Sebagai badan pembangunan global, UNDP yang telah digalakkan selama beberapa dekade di Sri Lanka menghadapi masalah stabilitas / keamanan.

Di samping masalah keamanan tersebut, konflik macan Tamil ternyata merupakan bagian dari upaya perjuangan gender dari kaum Perempuan Tamil. Dalam persepsi kelompok pemberontak ini, pemerintah nasional dianggap telah melakukan diskriminasi tidak hanya terhadap etnis Tamil secara umum, namun juga terhadap perempuan. Penegakan tujuan nasional dalam konflik tersebut telah menimbulkan berbagai korban kekerasan bagi perempuan. Lebih dari itu, keadaan pasca konflik juga menimbulkan berbagai permasalahan perempuan yang cukup krusial.

Program pembangunan tidak berjalan tanpa adanya keadaan yang aman. LTTE yang dapat dikatakan sebagai gerakan pemberontakan menjadi suatu masalah berkepanjangan di negara tersebut. Di sisi yang lebih khusus, masalah diskriminasi gender juga tidak bisa dilepaskan dari konflik ini. Untuk itu konteks permasalahan dan fokus kekerasan gender akan dijelaskan dalam bagian ini.

### ***Konflik Macan Tamil***

Misi UNDP adalah fokus pada aspek pembangunan dalam berbagai lini. Sebagaimana diketahui, lembaga ini sudah beroperasi di Sri Lanka sejak 1967. Selama beberapa dekade tersebut tentu UNDP menghadapi konflik sipil.

Konflik antara Sri Lanka dan Macan Tamil berawal dari kesenjangan yang dialami oleh etnis minoritas Tamil terhadap etnis Sinhala sebagai mayoritas di Sri Lanka. Dari sekitar 17.5 juta penduduk, etnis Sinhala berjumlah sekitar 74% yang sebagian besar beragama Budha, sementara etnis Tamil berjumlah 12% dengan Hindu sebagai agama dominan (Alison, 2003). Kebijakan *Sinhala Sentris* di tahun 1950-an yang

memberlakukan kebijakan bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi di Sri Lanka sangat memberatkan etnis Tamil. Warga Tamil yang bekerja di pemerintahan kemudian diberhentikan.

Dalam upaya menanamkan identitas nasional yang terlalu memihak etnis Sinhala kepada rakyatnya, Solomon Bandaranaike yang menjabat sebagai presiden Sri Lanka pada saat itu merancang slogan "Sinhala Only". Sri Lanka melakukan hal tersebut mengingat jumlah penduduk Sri Lanka yang didominasi oleh etnis Sinhala. Niat yang dilakukan Bandaranaike awalnya bertujuan baik, yaitu mengangkat derajat orang Sinhala yang memudar di zaman penjajahan Inggris.

Tetapi perubahan telah terjadi di luar batas. Etnis Tamil yang tidak bisa berbahasa Sinhala mulai tergusur ke daerah pinggiran. Banyak posisi-posisi pekerjaan yang tidak bisa mereka isi. Dengan kebijakan yang diskriminatif itu, mereka yang bukan pengguna bahasa Sinhala digeser, dipersulit akses pendidikannya dan mengalami beragam bentuk diskriminasi di segala bidang.

Fanatisme golongan terbentuk setelah semakin terasa dominasi etnis Sinhala dalam bidang politik dan budaya. Etnis Tamil semakin putus asa karena ada kecenderungan mengidentifikasikan Sri Lanka dengan Sinhala. Etnis Tamil merasa kebudayaan dan identitasnya mulai terancam. Bergantinya nama dari Ceylon menjadi Sri Lanka yang dilakukan pemerintah Sri Lanka tidak berhasil untuk meredakan kemarahan rakyat Tamil. Ceylon adalah istilah Inggris yang berasal dari ungkapan Sanskrit, Simhaladvipa yang berarti tanah/negeri orang Sinhala.

Sejak saat itu etnis Tamil melakukan aksi-aksi perlawanan. Di akhir tahun 1960-an, beberapa pemuda Tamil yang termasuk di antaranya Velupillai Prabhakaran terlibat dalam aktivitas-aktivitas demonstrasi warga Tamil terhadap pemerintah saat itu. Mereka kemudian membentuk Macan Tamil Baru atau *Tamil New Tiger (TNT)* di tahun 1972 yang berbasis ras dengan mengambil inspirasi dari millenium pertama kekaisaran Chola, kerajaan yang menjadi simbol kejayaan Tamil pada masa lalu. Simbol Macan yang digunakan pun diambil dari lambang kekaisaran tersebut.

Perlu diketahui, etnis Tamil sendiri terbagi setidaknya ke dalam lima kelompok separatis. Masing-masing di antara mereka berbeda pendapat, misi dan strategi dalam menuntut kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, di antara mereka juga sering terjadi perselisihan yang berujung konflik intern etnis Tamil. Namun kelompok Tamil yang paling kuat adalah LTTE atau lebih dikenal dengan kelompok Macan Tamil. Macan Tamil menjadi kelompok hegemoni setelah pada tahun 1980an berhasil mengalahkan kompetitor mereka.

Macan Tamil sendiri telah membentuk pemerintahan sendiri dengan mendirikan kepolisian, membangun sekolah, serta pengadilan. Dengan seringnya menggunakan anak-anak dalam kampanye mereka, kelompok ini mendapat kecaman keras oleh dunia internasional. Dengan tujuan politiknya yang berkaitan dengan konflik etno-politik di Sri Lanka, kelompok ini digolongkan sebagai gerakan teroris terkuat di dunia. Hal ini didasarkan pada jaringan logistik dan infrastruktur yang tersebar di seluruh dunia (Stepanova, 2008, p. 7). Kelompok tersebut mulai terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Sri Lanka sejak tahun 1983. Dikatakan juga sebagai gerakan teror karena mereka menggunakan taktik atau strategi gerilya (Combs & Slann, 2009, p. 171). Bahkan sebuah pendapat menyatakan Macan Tamil sebagai kelompok paling terkenal berbahaya di regional (Baumann, 2007, p. 266).

Macan Tamil atau LTTE telah menunjukkan kapabilitasnya sebagai gerakan institusional yang radikal dengan merekrut, melakukan sosialisasi, dan memanfaatkan sumber daya manusia hingga dapat terdoktrinasi secara total. Gerakan brutalnya melalui metode bunuh diri dinilai paling efektif dalam penyerangan (Forest, 2007, p. xix).

Berbagai peristiwa penting dalam konflik antara pemerintah Sri Lanka dengan LTTE dapat dipahami dalam timeline berikut (ICAN, 2013):

- 1948: kemerdekaan Sri Lanka dari pemerintahan Inggris. Kewarganegaraan Tamil membantah melalui "Citizenship Act".
- 1956: Sinhala menjadi bahasa resmi Sri Lanka.
- 1972: Konstitusi Baru mempertahankan Sinhala sebagai bahasa resmi Sri Lanka dan membuat agama Buddha agama resmi negara itu, dan selanjutnya mengasingkan Tamil dan minoritas lainnya.
- 1981: Polisi Sinhala diduga membakar Perpustakaan Umum Jaffna, menyebabkan kebencian di masyarakat Tamil.
- 1983: Serangan gerilya pertama oleh pejuang Tamil membunuh 13 tentara. Kerusuhan meletus, menewaskan ratusan orang. Dimulailah "Perang Pertama Eelam".
- 1985: Upaya Pertama pada pembicaraan damai antara pemerintah dan LTTE gagal.
- 1998-2002: Upaya mediasi berhasil dipimpin oleh masyarakat sipil dan Association of Parents of Missing Servicemen

- 2002: Norwegia menengahi gencatan senjata antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka.
- 2004: LTTE pecah, Kolonel Karuna keluar dari LTTE, membentuk pasukan pro-pemerintah.
- 2005: Mahinda Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden.
- 2006: (April) – insiden-insiden kecil pemicu konflik mulai pecah lagi.
- 2008: Pemerintah Sri Lanka secara resmi menarik diri dari gencatan senjata dengan LTTE dan baru meletus pertempuran.
- 2009: Setelah berbulan-bulan pertempuran dengan LTTE, pemerintah menyatakan kemenangan.

Eksistensi LTTE memang cukup panjang sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2009. Dengan waktu yang lama tersebut, kelompok ini telah mempengaruhi dinamika berbagai aspek terutama sosial dan politik di Sri Lanka. Dari dinamika itu, perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam periode yang panjang itu, keamanan Sri Lanka permasalahan serius secara nasional. Bagi suatu lembaga yang menangani pembangunan, UNDP tentu tidak dapat begitu saja menjalankan programnya dengan lancar. Setidaknya, UNDP hanya dapat menyentuh masyarakat di beberapa wilayah yang aman dari konflik. Artinya pembangunan tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai secara nasional.

Sebagai tambahan, isu keamanan yang berkepanjangan juga telah menguras perhatian nasional. Kerjasama pembangunan dengan pemerintah setempat tentu akan dinilai sebagai suatu kebijakan yang bukan prioritas. Hal ini menjelaskan alasan UNDP selama beberapa dekade terkesan tidak menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan karena alasan keamanan.

### ***Perempuan dan Macan Tamil : Antara Perjuangan Gender dan Korban Kekerasan***

Secara spesifik, salah satu tujuan UNDP ialah meningkatkan peran kaum perempuan dalam berbagai bidang. Secara resmi, lembaga ini masuk melalui kerjasama dengan pemerintah nasional. Namun di lain sisi, pihak pemberontak - dalam hal ini adalah etnis Tamil, juga menunjukkan adanya sebagian upaya perjuangan kaum perempuan.

Dalam perjuangan kelompok Macan Tamil sendiri, perempuan menempati peran yang cukup diperhitungkan. Keterlibatan perempuan sebagai pejuang menunjukkan bahwa LTTE merupakan gerakan feminisme. Namun di sisi lain, korban perempuan akibat konflik berkepanjangan ini juga tidak sedikit. Hal ini menimbulkan

perdebatan tersendiri dalam pembahasan tentang feminisme di Sri Lanka. Bagian ini mencoba menjelaskan peran perempuan dalam perjuangan LTTE serta mengurai kesenjangan terhadap perempuan akibat konflik tersebut.

Perempuan dalam kelompok Tamil sendiri tidak begitu berperan, setidaknya pada awal-awal kelompok tersebut dibentuk. Namun pada tahun 1980-an, partisipasi perempuan menunjukkan peningkatan. Salah satu alasannya karena LTTE yang berupaya mengkader perempuan dalam perekrutan sebagai pejuang. Perempuan dalam hal ini terlibat dalam upaya propaganda, sebagai petugas medis, pencari informasi, dan lebih jauh lagi dilatih sebagai pasukan / kombatan.

Bahkan untuk divisi khusus perempuan, pada 1983 LTTE pernah membentuk *Vituthalai Pulikal Munani* atau Women's Front of the Liberation Tigers. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan perempuan semakin meningkat. Mereka bahkan telah terdidik dan terlatih militer dengan disiplin yang tinggi. Angka kombatan perempuan dalam kelompok Macan Tamil sendiri ditaksir berkisar 20 sampai 33 persen dari keseluruhan total kekuatan pasukan.

Keikutsertaan perempuan dalam kombatan menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri. Secara umum diketahui bahwa dalam perekrutan, LTTE meminta setiap keluarga etnis Tamil untuk mengerahkan minimal satu dari anggotanya untuk bergabung dalam organisasi tersebut. permintaan tersebut sebenarnya bersifat suka rela. Seiring banyaknya korban laki-laki yang gugur, kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan menjadi urgen. Untuk itu, perempuan kemudian ikut mengambil peran.

Perempuan yang bergabung sendiri cenderung termotivasi oleh semangat nasionalisme atas nama etnis Tamil. Mereka menginginkan kedaulatan Tamil, baik hak maupun tanah air. Hal ini karena pemerintah dinilai kurang memperhatikan hak asasi etnis Tamil. Kecenderungan respek lebih banyak kepada etnis Sinhalese. Untuk itu mereka harus mempunyai kebijakan dan wilayah sendiri yang terpisah dari Sri Lanka.

Alasan lain yang mendorong keterlibatan perempuan adalah penderitaan, penindasan dan ketidakadilan. Kebanyakan mereka yang melibatkan diri dalam perjuangan bersenjata adalah mereka yang pernah mengalami penindasan dari pemerintah. Selain itu, perempuan juga terdorong karena rasa marah dan benci lantaran anggota keluarga yang dicintainya meninggal di tangan pasukan pemerintah. Bahkan dengan latar belakang tersebut, perempuan di usia muda pun terdorong untuk ikut bergabung. Selain itu, ada pula pembatasan dan gangguan pendidikan yang menyebabkan perempuan bergabung dalam LTTE. Hal ini tidak lain disebabkan oleh

tidak tercapainya keinginan untuk mendapatkan edukasi dari adanya operasi militer yang menutup layanan pendidikan (Alison, 2003).

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa perempuan menjadi bagian dari LTTE dengan berbagai latar belakang atau motivasi. Sehingga yang perlu digaris bawahi adalah semangat perempuan memperjuangkan hak bagi etnis mereka. Berkaitan dengan misi *empowering women*, UNDP menemui tantangan serius. Di satu sisi lembaga ini ingin membangun melalui jalur pemerintah, namun di sisi lain LTTE juga diperjuangkan sebagai upaya perjuangan gender.

Maka dengan berakhirnya konflik, UNDP tentu akan mendapatkan angin segar untuk melancarkan pembangunan. Namun demikian, bukan berarti pasca konflik tantangan menjadi tidak ada. Akhir perang sipil ini ternyata menimbulkan berbagai problematika. Salah satunya adalah permasalahan perempuan dikaitkan dengan tanggung jawab negara.

### **Permasalahan Perempuan Pasca Konflik LTTE**

Bulan Mei tahun 2009, militer Sri Lanka telah menumpas Pembebasan Macan Tamil. Hal ini menandai berakhirnya kepemimpinan dan kendali Tamil di negara itu. Sri Lanka dipuji sebagai negara pertama untuk memberantas terorisme di tanah sendiri, tapi kemenangan 2009 datang dengan biaya manusia yang signifikan. Diperkirakan 300.000 orang mengungsi. Menurut PBB, sekitar 40.000 warga sipil tewas dalam lima bulan pertama tahun 2009. Keluarga dan masyarakat sipil terutama etnis Tamil dibunuh dan jasad mereka tak bisa dikenali. Dalam satu survei dari daerah yang dilanda perang, sebanyak 80% perempuan korban perang menjadi janda karena suami mereka yang tewas ketika konflik berlangsung, dan mereka yang menikah, bercerai atau hidup terpisah dari suami mereka, sebanyak 70% di antaranya terpaksa memimpin rumah tangga dan mayoritas tidak punya pekerjaan.

Kerusakan yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil telah menjadi subyek dari investigasi jurnalisisme dan organisasi hak asasi manusia. Pada Februari 2013, Human Rights Watch (HRW) melaporkan kekerasan seksual terhadap Tamil oleh Pasukan Keamanan Sri Lanka, tercatat 75 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap perempuan Tamil antara tahun 2006 dan 2012. Kasus kekerasan seksual ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan ikut bergabung dalam perjuangan LTTE.

Penyelidikan resmi PBB juga menyimpulkan bahwa di tengah perang pemerintah dan LTTE di bulan-bulan terakhir perang di tahun 2009, pemerintah Sri



Lanka bertanggung jawab untuk sebagian besar kematian dan tuduhan kejahatan perang. Pada bulan Februari 2013, Amerika Serikat membawa resolusi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Sri Lanka di Dewan HAM PBB, namun masyarakat internasional tidak mempersoalkan secara lebih lanjut karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal dan terkait kedaulatan Sri Lanka dalam bagian ini karena mereka menilai pihak LTTE juga sangat ekstrem. Sementara itu, pemerintah Sri Lanka tidak berniat untuk menggali masa lalu atau apa yang terjadi selama konflik berlangsung dan menyangkal tuduhan pelecehan. Penekanan mereka adalah pada pemulihan, rekonstruksi dan masa depan.

Selain itu, pemerintah memperkirakan bahwa di area utara dan timur Sri Lanka ada 90.000 janda, kebanyakan dari mereka di bawah usia 40 tahun. Sebuah survei yang dilakukan oleh Jaffna-based Center for Women and Development mengungkapkan bahwa wilayah utara memiliki sekitar 40.000 kepala keluarga perempuan, termasuk lebih dari 20.000 di distrik Jaffna saja. Meskipun demikian, tingkat pengangguran bagi perempuan adalah dua kali lipat dari jumlah laki-laki (Social Scientists Association, 2011). Tingkat kemiskinan sangat tinggi. Banyak dari mereka berasal dari keluarga tradisional di mana peran utama mereka adalah untuk mengelola urusan rumah tangga dan memberikan pendapatan untuk dikelola suami mereka. Memasuki dunia kerja di dalam tingkatan masyarakat merupakan tantangan besar bagi mereka.

Stigma yang diasosiasikan dengan istilah “janda” masih kuat dalam budaya Hindu. Ini adalah kendala utama yang banyak wanita Tamil hadapi setiap hari. Di daerah pedesaan tidak diatur dan di sektor non-serikat misalnya, perempuan menerima upah yang lebih rendah karena mereka dianggap kurang terampil. Mereka juga menjadi target eksploitasi. Hak-hak mereka dibatasi untuk memiliki tanah. Proses rekonstruksi pasca-perang diarahkan pada unit keluarga tradisional dengan asumsi bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan pembuat keputusan. Meskipun wanita di beberapa distrik telah berkonsultasi dalam rehabilitasi pekerjaan, perhatian pada mereka sering kali diabaikan dalam aturan yang ditetapkan.

Dalam memahami program kesetaraan gender dari PBB, dengan adanya permasalahan perempuan ini UNDP tentu mengalami kesulitan. Di satu sisi UNDP ingin menghapus diskriminasi gender di seluruh wilayah Sri Lanka, namun di sisi lain, permasalahan gender itu sendiri justru bertentangan dengan pemerintah yang melawan LTTE. Padahal LTTE sendiri merupakan bagian dari gerakan feminisme di negara tersebut.

## Kesimpulan

Upaya menegakkan kesetaraan gender di Sri Lanka telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah UNDP. Program yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut bukan tanpa hambatan. Tesis ini mencoba mempelajari faktor-faktor penghambat tersebut. Beberapa hal yang dapat menjadi acuan dalam memahami sulitnya UNDP dalam menyetarakan gender di Sri Lanka adalah adanya konflik separatis. Konflik separatis etnis Tamil terutama LTTE telah menghambat berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi internasional. Dengan adanya situasi yang tidak aman dan berkepanjangan, program-program UNDP sulit dilaksanakan.

Dengan demikian, studi ini menggarisbawahi bahwa suatu rezim atau organisasi internasional tidak bisa memaksimalkan tujuannya di suatu negara ketiga negara tersebut dalam keadaan tidak stabil serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Dalam suasana konflik, UNDP akan selalu menghadapi kendala. Sudah menjadi paradigma umum bahwa kondisi yang tidak aman akan menghambat setiap tindakan/kebijakan tanpa terlebih menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, UNDP mengalami hambatan karena di satu sisi organisasi ini harus berjalan pada pihak otoritas pemerintahan, namun di sisi lain gerakan LTTE juga dinilai sebagai perjuangan hak gender di negara tersebut. Hal ini menyulitkan UNDP untuk melakukan setiap pendekatan dalam mencapai program MDGs terutama dalam misi "Empowering Women".

## Daftar Pustaka

- Alison, M. (2003). Cogs in the wheel? Women in the Liberation Tigers of Tamil Eelam. *Civil Wars*, 6(4), 37-54.
- Baumann, K. (2007). Red sky in the morning: The Nexus between international maritime piracy and transnational terrorism. *Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century. International Perspectives* (Vol. 2). London: Praeger Security International.
- Combs, C. C., & Slann, M. W. (2009). *Encyclopedia of terrorism*. Infobase Publishing.
- Forest, J. J. (2007). *Countering terrorism and insurgency in the 21st century: international perspectives* (Vol. 1-3). London: Praeger Security International.

- Green, P. (n.d.). *Team 1325 and Women in Sri Lanka: Building a Common Platform for Peace*. Retrieved January 10, 2015, from <http://www.karunacenter.org/reports/srilankafall08.pdf>
- ICAN. (2013, March 7). *Elusive Peace, Pervasive Violence: Sri Lankan Women's Struggle for Security and Justice*. (Spring 2013). ICAN. Retrieved June 25, 2018, from <http://www.icanpeacework.org/2013/03/07/elusive-peace-pervasive-violence-sri-lankan-womens-struggle-for-security-and-justice-spring-2013/>
- lankanewspapers.com. (2010, March 22). *Women quota in Sri Lanka Parliament urged*. Retrieved June 25, 2018, from <http://www.lankanewspapers.com/2017/08/06/their-bonds-and-our-bonds/n-peace.net>
- n-peace.net. (2012). *Women's Leadership Development Project, Ampara District*. n-peace.net. Retrieved from [n-peace.net/publications/download/46](http://n-peace.net/publications/download/46)
- Perera, R. (2015). *Sri Lanka's Development Goals Fall Short on Gender Equality*. *Inter Press Service News Agency*. Retrieved June 25, 2016, from <http://www.ipsnews.net/2015/05/sri-lankas-development-goals-fall-short-on-gender-equality/>
- R.A Kawilarang, R. (2010, November 19). *PRT Sri Lanka pun Bermasalah di Arab Saudi*. VIVA. Retrieved June 25, 2017, from <https://www.viva.co.id/berita/dunia/189516-prt-sri-lanka-pun-bermasalah-di-arab-saudi>
- Robertson, A. E. (2010). *Key Players. Terrorism and global security*. Infobase Publishing.
- Senarath, R. (n.d.). *Melanjutkan Isu Sistem Pendidikan di Sri Lanka*. Retrieved June 10, 2014, from <http://www.idp-europe.org/eenet-asia/eenet-asia-5-ID/page30.php>
- Social Scientists Association. (2011). *Women Manifesto*. Karunaratne & Sons (Ptv.).
- Stepanova, E. A. (2008). *Terrorism in asymmetrical conflict: Ideological and structural aspects* (Vol. 23). Oxford: Oxford University Press.
- Stokke, O. S. (2007). *Determining the Effectiveness of International Regimes*. paper for discussion at the 15th national academic conference in political ....
- UN. (2012). *Report of the Secretary-General's Internal Review Panel on United Nations Action in Sri Lanka*. Retrieved April 5, 2016, from [https://www.un.org/News/dh/infocus/Sri\\_Lanka/The\\_Internal\\_Review\\_Panel\\_report\\_on\\_Sri\\_Lanka.pdf](https://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf)

UNDP. (2012, March 20). The Women's Leadership Development Project (WLDP).  
*UNDP in Sri Lanka*. Retrieved June 25, 2015, from  
<http://www.lk.undp.org/content/srilanka/en/home/presscenter/articles/2012/03/20/the-women-s-leadership-development-project-wldp-.html>